

KESESUAIAN ANTARA STANDAR KOMPETENSI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN MATERI KULIAH PADA PRODI PLS UNESA

Widya Nusantara

Universitas Negeri Surabaya

E-mail : widyanusantara@unesa.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 02/2018

Disetujui 03/2018

Dipublikasikan 04/2018

Keywords:

Community Empowerment Facilitator, competency test, Non-Formal Education

Abstrak

Artikel ini berisi tentang hasil analisis kesesuaian kompetensi kelompok mata kuliah pemberdayaan masyarakat pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah terhadap materi uji kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menurut SKKNI yang telah ditetapkan yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomer 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dan mengidentifikasi kesesuaian materi ajar praktek Pemberdayaan masyarakat pada jurusan pendidikan luar sekolah terhadap materi kompetensi Fasilitator pemberdayaan masyarakat sesuai SKKNI. Penelitian ini adalah penelitian analisis Isi (content analysis). Subyek penelitian ini adalah semua bahan ajar rumpun ilmu pemberdayaan masyarakat di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah UNESA, yang meliputi hand out, pedoman praktikum, diktat dan bahan ajar. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi di arsip jurusan. Dokumen yang dikumpulkan yaitu : kompetensi dan materi ajar rumpun keilmuan pemberdayaan masyarakat dan kompetensi/ materi uji kompetensi sesuai dengan SKKNI. Analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif, dengan menghitung persentase kesesuaian materi rumpun ilmu pemberdayaan masyarakat Jurusan Pendidikan Luar Sekolah dengan standar uji kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian adalah kompetensi pemberdayaan masyarakat yang diajarkan di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah belum memenuhi semua standar kompetensi SKKNI fasilitator pemberdayaan masyarakat.

Abstract

This article is about the results of the suitability of groups of community empowerment in the Department of Non-formal Education on Community Empowerment Facilitator competency test according to the stipulated SKKNI, Minister of Manpower Decree of the Republic of Indonesia number 81 of 2012 concerning the Establishment of the Indonesian National Work Sector Competency Standards Plan. Community Sector Community Empowerment for Community Empowerment Facilitator Position and identify the suitability of teaching materials for Community Empowerment practice in the department of non-formal education on the material for Community Empowerment Facilitator competency in accordance with SKKNI. This research is content analysis. The subjects of this study were all teaching materials for community empowerment science in the UNESA Department of Non-formal Education, which included hand outs, practicum guidelines, dictates and teaching materials. Data is collected by documentation techniques in department archives. The documents collected were: competency and teaching material for the scientific family community empowerment and competency/ competency test material in accordance with SKKNI. Data analysis using quantitative analysis techniques, by calculating the percentage suitability of the material of the community empowerment science cluster of the Department of Non-Formal Education Education with the test standards of the competence of Community Empowerment Facilitators. The results of the study were that community empowerment competencies taught in the Department of c did not meet all SKKNI competency standards for community empowerment facilitators.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:

Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan

Gedung O-1 Lantai 2 Jalan Lidah Wetan Sby Kode Pos 60213

Telp. 031-7532160 Fax. 031-7532112

E-mail: jpus@unesa.ac.id

E- ISSN **2580-8060**



Salah satu tantangan dalam era industri 4.0 ini adalah persoalan kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh setiap lulusan suatu perguruan tinggi. Lulusan Perguruan tinggi harus dibekali dengan kompetensi kerja tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Suatu kompetensi kerja yang dimiliki oleh lulusan harus dapat dibuktikan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang ada, sehingga lulusan Perguruan Tinggi tidak hanya mendapatkan ijazah saja melainkan sertifikat kompetensi kerja. Dengan adanya sertifikat kompetensi kerja ini maka ia akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya.

Masalah timbul apabila lulusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja, apalagi calon lulusan suatu program studi yang ada di Perguruan Tinggi tidak memiliki kompetensi kerja, maka akan menyulitkan lulusan dalam berkompetisi di dunia usaha dan industri.

Hal ini yang harus diselesaikan dan dituntaskan oleh segenap civitas program studi pendidikan luar sekolah. Pertanyaan yang mendasar Kompetensi apa yang bisa diakses dan dikuasai oleh calon lulusan prodi Pendidikan Luar Sekolah. Pada prinsipnya peluang kompetensi kerja yang dapat dimiliki oleh lulusan prodi Pendidikan Luar Sekolah itu ada dan sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri selama ada suatu kebijakan pemerintah yang mengaturnya.

Sampai saat ini lulusan prodi PLS di Universitas Negeri Surabaya belum memiliki profesi yang jelas padahal banyak kompetensi yang dapat dimiliki lulusan yaitu sebagai pendidik orang dewasa atau sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat.

Dari dua kompetensi yang dapat dimiliki oleh mahasiswa PLS adalah Kompetensi pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kompetensi yang bisa dimiliki oleh mahasiswa PLS dengan mengacu pada SKKNI yang telah ditetapkan yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara skema fasilitator pemberdayaan masyarakat pada SKNI Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang pemberdayaan Masyarakat untuk dengan mata kuliah Rumpun keilmuan Pemberdayaan masyarakat pada jurusan Pendidikan Luar Sekolah UNESA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Analisis Isi (Content Analysis). Subyek penelitian ini adalah semua bahan ajar matakuliah di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah UNESA, yang meliputi hand out, diktat, dan Instrumen Observasi. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi arsip dari Unit Penjaminan Mutu jurusan PLS dan arsip di Lembaga Sertifikasi Profesi UNESA, dokumen yang dikumpulkan yaitu: SKKNI dan Skema Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, dan materi ajar yang berkaitan dengan kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat.

Analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif, dengan menghitung persentase kesesuaian materi ajar yang berkaitan dengan fasilitator pemberdayaan masyarakat jurusan pendidikan Pendidikan Luar Sekolah dengan standar uji ketrampilan kerja sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi UNESA

HASIL

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya telah memulai menyusun Konsep Kurikulum berbasis KKNi sejak turunnya Perpres Nomor 8 tahun 2012 diiringi turunnya Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi yang diawali dengan pertemuan dalam Forum Jurusan PLS se-Indonesia dan pertemuan Ikatan Akademisi Pendidikan Nonformal dan Informal Indonesia (IKAPENFI).

Dalam berkali-kali pertemuan akhirnya pada tanggal 1 Nopember 2014 telah disepakati seluruh oleh seluruh jurusan PLS se-Indonesia

tentang Profil Lulusan S1 PLS/PNF yaitu Lulusan S1 PLS/PNF mampu bekerja sebagai Pendidik PLS meliputi pekerjaan sebagai pamong belajar, tutor/instruktur/pelatih, penyuluh keluarga berencana, penyuluh kesehatan masyarakat, penyuluh sosial, widyaiswara, fasilitator desa tertinggal, fasilitator pemberdayaan masyarakat dan sebagai tenaga kependidikan pengelola pada program-program pendidikan luar sekolah seperti lembaga pelatihan, lembaga kursus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Untuk kompetensi Pemberdayaan Masyarakat yang diajarkan serta jumlah sks masing-masing mata kuliah dapat dilihat pada Tabel 1. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kompetensi Pemberdayaan masyarakat berjumlah 25 sks, total keseluruhan jumlah sks untuk Program Studi S-1 Pendidikan Luar Sekolah adalah 158 sks dengan komposisi 140 SKS matakuliah wajib dan 18 matakuliah pilihan apun syarat minimal kelulusan adalah 146 SKS. (Borang PLS,2014)

Tabel 1. MK yang Diajarkan serta bobot SKS

MK	Kompetensi	SKS
Andragogi/ Pendidikan orang dewasa	Mahasiswa memiliki pemahaman tentang : konsep, hakekat , tujuan, dan prinsip belajar orang dewasa, teori-teori belajar orang dewasa, pengorganisasian program belajar orang dewasa, metode pembelajaran orang dewasa evaluasi hasil belajar orang dewasa	2
Teori Pendidikan Kritis	Pemahaman tentang, konsep, teori dan tokoh-tokoh pencetus Pendidikan kritis, serta teori-teori turunan yang berkembang di era modern keterampilan melakukan analisis terhadap dasar-dasar pengembangan masyarakat melalui kajian pendidikan kritis konteks realitas sosial,	2
Identifikasi kebutuhan dan sumber belajar	Konsep dan teknik perencanaan identifikasi kebutuhan dan sumber belajar bagi individu, lembaga dan masyarakat, Penggunaan Metode PRA dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Melakukan assesment kebutuhan belajar masyarakat	3

Bimbingan dan Penyuluhan Sosial	pemahaman tentang masalah social, metode dan tehnik dalam pekerjaan sosial, dan kemampuan menganalisis berbagai masalah sosial (individu, kelompok, masyarakat), serta melakukan penanganan masalah-masalah sosial dengan metode dan tehnik pekerjaan social	4
Manajemen pelatihan	konsep pendidikan dan pelatihan, model-model pelatihan, merancang pelatihan yang efektif, metode dan tehnik dalam pelatihan, praktek melaksanakan diklat dgn menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	3
Pengembangan Media Pembelajaran	memahami tentang fungsi, arti, jenis, karakteristik teknologi pembelajaran PLS, kreteria dan penggunaan media pembelajaran untuk kegiatan pengembangan masyarakat pembuatan desain, pembuatan macam-macam media pembelajaran mulai dari grafis, audio visual, multi media sampai pada film pendidikan luar sekolah serta alat-alat lain untuk pengembangan masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi pembelajaran masyarakat.	3
Komunikasi sosial	Mahasiswa mampu mengaplikasikan hakekat, konsep, macam-macam komunikasi Sosial, fungsi dan proses berkomunikasi, ciri-ciri komunikasi efektif, tehnik-tehnik komunikasi yang baik dan keterampilan Negosiasi serta public relation	3
Pendidikan Masyarakat	Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang sejarah dan konsep pendidikan masyarakat, tujuan dan isi pendidikan masyarakat, hakekat pendidikan masyarakat dalam system pendidikan nasional, bidang garapan pendidikan masyarakat, serta SPEM dan 10 patokan pendidikan masyarakat melalui penjelasan, diskusi dan presentasi.	3

Jika dibandingkan dengan kompetensi SKNI dan Skema Sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang di kembangan Lembaga Sertifikasi Profesi UNESA, maka sebagian besar kompetensi sudah diajarkan di Jurusan Pendidikan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNESA. Adapun kompetensi kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (FPM) sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomer 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kompetensi Kerja FPM

NO	Kompetensi Kerja FPM
1.	Membangun Relasi Sosial
2.	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat
3.	Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik
4.	Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator
5.	Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan
6.	Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat
7.	Membangun Jejaring dan Kemitraan
8.	Membangun Solidaritas Sosial
9.	Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal
10.	Memperkuat PosisiTawar Masyarakat
11.	Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat
12.	Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat
13.	Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat
14.	Mengembangkan Kemandirian Masyarakat
15.	Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat
16.	Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial
17.	Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
18.	Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu

Jika dibandingkan dengan kompetensi SKKNI, maka sebagian besar kompetensi dan sub kompetensi pada Kompetensi Kerja FPM sudah diajarkan di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNESA. Perbandingan kompetensi tersebut dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan antara matakuliah yang diajarkan dengan kompetensi kerja FPM

NO	Kompetensi Kerja FPM	Kompetensi diajarkan pada Matakuliah
1.	Membangun Relasi Sosial	Identifikasi dan Kebutuhan Masyarakat
2.	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat	Identifikasi dan Kebutuhan Masyarakat
3.	Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik	Teori Pendidikan Kritis
4.	Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan	Pendidikan Masyarakat
5.	Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator	-
6.	Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat	-
7.	Membangun Jejaring dan Kemitraan	-
8.	Membangun Solidaritas Sosial	Identifikasi dan Kebutuhan Masyarakat

9.	Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal	Identifikasi dan Kebutuhan Masyarakat
10.	Memperkuat PosisiTawar Masyarakat	-
11.	Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat	Identifikasi dan Kebutuhan Masyarakat
12.	Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat	Manajemen pelatihan, Andragogi/ Pendidikan orang dewasa
13.	Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat	-
14.	Mengembangkan Kemandirian Masyarakat	-
15.	Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat	-
16.	Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial	-
17.	Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat	-
18.	Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu	-

3.1 Perbandingan kriteria unjuk kerja SKKNI dan pelaksanaan Pembelajaran di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Hasil analisis kesesuaian yang dilakukan terdapat beberapa komponen kompetensi FPM yang sudah diajarkan dan dipraktekkan oleh mahasiswa di jurusan Pendidikan luar sekolah

3.1.1 Membangun Relasi Sosial

Pengetahuan yang sudah diajarkan dalam penguatan kemampuan membangun relasi sosial adalah: Konsep dasar Masyarakat, Kelembagaan Masyarakat dan struktur Sosial. Sedangkan pengetahuan yang belum diajarkan meliputi Kearifan lokal dan kerangka etnografi.

Tabel 4. Perbandingan uji kerja membangun relasi

NO	Unjuk Kerja dalam Sertifikasi profesi FPM	Pross pembelajaran	
		Diajarkan	Tidak diajarkan
Melakukan Pendekatan Sosial			
1	Orang-orang kunci diidentifikasi.	V	
2	Perkenalan dengan masyarakat dilakukan.	V	
3	Kepercayaan masyarakat dibangun.	V	

	Membangun hubungan sosial dengan pemangku kepentingan		
4	Komunikasi sosial dilakukan	V	
5	Pemangku kepentingan diidentifikasi.	V	
6	Karakteristik pemangku kepentingan dikenali.	V	
7	Interaksi dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan dikembangkan.	V	
	Mengembangkan relasi sosial		
8	Harapan antar pemangku kepentingan diidentifikasi.	V	
9	Sinergi kepentingan antar kelompok pemangku kepentingan dibangun.	V	
10	Jaringan antar pemangku kepentingan dikembangkan.	V	

Keterampilan yang sudah dipraktikkan meliputi: Terampil menerapkan metode dan pendekatan partisipatif, Terampil berkomunikasi secara efektif, Terampil berkomunikasi secara personal dan inter personal. Sedangkan Keterampilan yang belum di praktikan meliputi: Terampil berbahasa Indonesia, Terampil beradaptasi dan berintegrasi dengan masyarakat, Terampil menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan informasi.

3.1.2 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat

Pengetahuan yang sudah diajarkan dalam penguatan kemampuan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat adalah: Optimalisasi sumberdaya dalam suatu kawasan. Sedangkan pengetahuan yang belum diajarkan meliputi Pemantauan dan Evaluasi dan konsep safeguard.

Tabel 5. Perbandingan uji kerja mengoptimalkan sumberdaya yang ada di masyarakat

NO	Unjuk Kerja dalam Sertifikasi profesi FPM	Pross pembelajaran	
		Diajarkan	Tidak diajarkan
	Mengidentifikasi potensi sumberdaya yang ada di masyarakat		
1	Diskripsi potensi sumberdaya (alam, manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan) diidentifikasi.	V	
2	Potensi sumberdaya (alam, manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana) dianalisis.	V	
3	Gagasan pemanfaatan sumberdaya (alam, manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan) dipetakan.	V	
	Memberi pilihan inovasi bagi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat		

4	Inovasi bagi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dikenali.	V	
5	Pengujian inovasi dilakukan.	V	
6	Hasil pengujian didemonstrasikan.	V	
7	Tanggapan masyarakat dievaluasi.	V	
	Menerapkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat		
8	Gagasan dan inovasi pemanfaatan sumberdaya (alam, manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan) disampaikan kepada pihak terkait.	V	
9	Penerapan inovasi dilaksanakan.	V	
10	Kemungkinan dampak negatif dalam pemanfaatan sumberdaya diminimalisir.	V	

Keterampilan yang sudah dipraktikkan meliputi: Analisis potensi sumberdaya, Berkomunikasi yang efektif, Membangun akses pada lembaga-lembaga terkait. Sedangkan Keterampilan yang belum di praktikan meliputi: Menemukanali pengetahuan local

3.1.3 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik

Pengetahuan yang sudah diajarkan dalam penguatan kemampuan Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik adalah: Pembelajaran bersama masyarakat, Penggerakan masyarakat, Analisis kebutuhan. Sedangkan pengetahuan yang belum diajarkan meliputi Hak-hak Dasar Manusia (HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan HAK Sipil dan Politik), Standar hidup layak

Tabel 6 Perbandingan uji kerja mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju kehidupan lebih baik

NO	Unjuk Kerja dalam Sertifikasi profesi FPM	Pross pembelajaran	
		Diajarkan	Diajarkan
	Melakukan penilaian terhadap realitas sosial di masyarakat dan lingkungannya secara cepat		
1	Rencana kegiatan dan panduan pengkajian keadaan masyarakat dan lingkungannya disusun bersama pemangku kepentingan.	V	
2	Pengumpulan dan analisis data dilakukan.	V	
3	Hasil kajian realitas sosial di masyarakat dan lingkungannya dirumuskan.	V	
	Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat		

4	Kebutuhan masyarakat diidentifikasi	V	
5	Prioritas kebutuhan dirumuskan	V	
Menganalisis masalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat			
6	Akar masalah dan penyebabnya diidentifikasi.	V	
7	Akar masalah dianalisis.	V	
8	Solusi perbaikandirumuskan.	V	

Keterampilan yang sudah dipraktikkan meliputi: Menilai realitas sosial dan lingkungan secara partisipatif, Melakukan analisis masalah dan kebutuhan, Menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran masyarakat, Menggunakan teknik penggerakan masyarakat secara partisipatif

3.1.4 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan

Pengetahuan yang sudah diajarkan dalam penguatan kemampuan Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan adalah: Dasar-dasar komunikasi, Media Komunikasi, Sarana Komunikasi, Jejaring Komunikasi, Penggunaan Teknologi Informasi

Tabel 7 Perbandingan uji kerja Meningkatkan Aksesibilitas Pemangku kepentingan

NO	Unjuk Kerja dalam Sertifikasi profesi FPM	Pross pembelajaran	
		Diajarkan	Tidak Diajarkan
	Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan media komunikasi yang digunakan		
1	Pemangku kepentingan ditetapkan	V	
2	Pola komunikasi antar pemangku kepentingan diidentifikasi.	V	
3	Semua media/sarana komunikasi diinventarisasi.	V	
4	Media yang dapat diakses masyarakat diinventarisir.	V	
Mengembangkan media komunikasi yang efektif			
5	Perkembangan media teknologi komunikasi diakses.	V	
6	Media yang dinilai efektif diinventarisasi.	V	
7	Media yang terjangkau dan efisien ditetapkan.	V	
8	Hambatan komunikasi antar pemangku kepentingan diidentifikasi	V	
9	Hambatan komunikasi diatasi.	V	
Mengembangkan jaringan komunikasi antar pemangku kepentingan			
10	Media komunikasi yang efektif dimanfaatkan.	V	

11	Pemanfaatan media komunikasi yang efektif dievaluasi.	V	
12	Pengembangan sistem komunikasi secara berkelanjutan direkomendasikan.	V	

Keterampilan yang sudah dipraktikkan meliputi: Mengidentifikasi ragam media komunikasi, Menginventarisasi media komunikasi yang tersedia/digunakan, Mengidentifikasi ragam sarana komunikasi, Menginventarisasi sarana komunikasi yang tersedia/digunakan, Memilih media dan sarana komunikasi yang baru dan Mengembangkan sistem komunikasi yang efektif secara berkala dan berkelanjutan

3.1.8 Membangun Solidaritas Sosial

Pengetahuan yang sudah diajarkan dalam penguatan kemampuan Membangun Solidaritas Sosial adalah: Model sosial, Metode pengembangan partisipasi masyarakat, demokrasi, hak asasi manusia,

Tabel 8 Perbandingan uji kerja membangun Solidaritas Sosial

NO	Unjuk Kerja dalam Sertifikasi profesi FPM	Pross pembelajaran	
		Diajarkan	Tidak Diajarkan
	Mengidentifikasi potensi-potensi sosial yang ada di masyarakat (individu, kelompok, masyarakat)		
1	Struktur dan pelapisan sosial penerima manfaat dan pemangku kepentingan diinventarisasi.	V	
2	Karakteristik potensi sosial (individu, kelompok, masyarakat) diinventarisasi.	V	
Membangun kepercayaan dan kerjasama para pihak			
3	Komunikasi kepada masing-masing kelompok sosial dilaku	V	
4	Komunikasi antar kelompok sosial dilakukan.	V	
5	Keterbukaan informasi antar pihak dikondisikan.	V	
6	Kepercayaan antar kelompok dikondisikan.		V
7	Komitmen dan kerjasama antar pihak dibangun secara partisipatif.		V
Memperkuat solidaritas antar pihak			
8	Pentingnya kebersamaan/partisipasi masyarakat telah dikomunikasikan.		V
9	Kesempatan berpartisipasi	V	

	diberikan.		
10	Kemampuan berpartisipasi ditingkatkan.	V	
11	Kemauan berpartisipasi ditumbuhkan.		V
Mengembangkan nilai-nilai saling memberi dan menerima yang adil			
12	Pentingnya nilai-nilai saling memberi dan menerima dikomunikasikan.		V
13	Nilai-nilai saling memberi dan menerima ditumbuhkan.		V
14	Nilai-nilai saling memberi dan menerima dilaksanakan berdasarkan musyawarah.		V

Sedangkan pengetahuan yang belum diajarkan meliputi Keadilan dalam masyarakat, Hak Asasi Manusia adapun Keterampilan yang sudah dipraktikkan meliputi: Melakukan komunikasi antar pribadi, Melakukan komunikasi dengan dan antar kelompok, Memfasilitasi negosiasi, Memimpin rapat, Menerapkan Analisis sosial

3.1.9 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal

Pengetahuan yang sudah diajarkan dalam penguatan kemampuan Konsep kelembagaan dijelaskan, Potensi kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal diidentifikasi dan Materi dan fasilitator pengembangan kapasitas diidentifikasi.

Tabel 9 Perbandingan uji kerja Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah lokal

NO	Unjuk Kerja dalam Sertifikasi profesi FPM	Pross pembelajaran	
		Diajaraka	Tidak Diajaraka
Memetakan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal			
1	Konsep kelembagaan dijelaskan.	V	
2	Kelembagaan masyarakat dipetakan.		V
3	Kelembagaan pemerintahan lokal dipetakan.		V
4	Peta Kapasitas Kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal diinventarisasi.		V
Menganalisis kebutuhan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal			
5	Potensi kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal diidentifikasi.	V	

6	Kinerja kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal dianalisis.		V
7	Hasil analisis kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal diinventarisir.		V
8	Rekomendasi pengembangan kelembagaan berdasarkan hasil analisis kinerja kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal dirumuskan.		V
Merencanakan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan			
9	Tujuan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal dirumuskan.		V
10	Rancangan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal dirumuskan.		V
11	Rancangan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal diajukan.		V
Mengimplementasikan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan			
12	Persiapan implementasi kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan		V
13	Sarana dan prasarana dan perlengkapan pengembangan kapasitas disiapkan.		V
14	Materi dan fasilitator pengembangan kapasitas diidentifikasi.	V	
15	Pengembangan kapasitas dilakukan.		V

Sedangkan pengetahuan yang belum diajarkan meliputi: Kelembagaan masyarakat dipetakan, Kelembagaan pemerintahan lokal dipetakan., Peta Kapasitas Kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal diinventarisasi, Kinerja kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal dianalisis, Hasil analisis kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal diinventarisir, Rekomendasi pengembangan kelembagaan berdasarkan hasil analisis kinerja kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal dirumuskan, Tujuan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal dirumuskan, Rancangan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal dirumuskan, Rancangan

pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal diajukan.

3.1.11 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat

Pengetahuan yang sudah diajarkan dalam penguatan kemampuan Mengumpulkan data keadaan wilayah secara partisipatif, Melakukan analisis isu strategis

Tabel 10 Perbandingan uji kerja Merencanakan kehidupan masyarakat

NO	Unjuk Kerja dalam Sertifikasi profesi FPM	Pross pembelajaran	
		Diajarka	Tidak Diajarka
1	Mengumpulkan data keadaan wilayah secara partisipatif	V	
2	Melakukan analisis isu strategis	V	
3	Merumuskan rencana perubahan		V
4	Mengupayakan pengesahan rancangan perubahan kepada masyarakat dan atau pemerintahan lokal		V
5	Melakukan sosialisasi program dan kegiatan		V

Sedangkan pengetahuan yang belum diajarkan meliputi: Merumuskan rencana perubahan, Mengupayakan pengesahan rancangan perubahan kepada masyarakat dan atau pemerintahan lokal, Melakukan sosialisasi program dan kegiatan.

3.1.12 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat

Pengetahuan yang sudah diajarkan dalam penguatan kemampuan Program dan pembelajaran masyarakat ditetapkan, Pembagian peran dirumuskan, Penerima manfaat diidentifikasi.

Tabel 11 Perbandingan uji kerja mengelola pebelajaran di dalam masyarakat

NO	Unjuk Kerja dalam Sertifikasi profesi FPM	Pross pembelajaran	
		Diajarka	Tidak Diajarka
	Mengidentifikasi penerima manfaat pembelajaran masyarakat		
1	Program dan pembelajaran masyarakat ditetapkan.	V	
2	Pembagian peran dirumuskan.		V
3	Penerima manfaat diidentifikasi.	V	
	Melakukan analisis kebutuhan pembelajaran masyarakat		

4	Perilaku nyata penerima manfaat diidentifikasi.		V
5	Kesenjangan perilaku penerima manfaat diidentifikasi.		V
6	Tujuan pembelajaran dirumuskan.	V	
7	Evaluasi pembelajaran ditetapkan.	V	
8	Instrumen evaluasi pembelajaran disiapkan.	V	
Menetapkan sumber pembelajaran dan fasilitatornya			
9	Kebutuhan sumber pembelajaran dan fasilitator dirumuskan.	V	
10	Sumber pembelajaran dan kualifikasi fasilitator diidentifikasi.	V	
11	Sumber pembelajaran dan kualifikasi fasilitator ditetapkan.	V	
Menetapkan jenis dan metode, serta perlengkapan pembelajaran			
12	Ragam jenis dan metode pembelajaran didiskripsikan.	V	
13	Ragam perlengkapan pembelajaran diidentifikasi.	V	
14	Jenis dan metode pembelajaran dipilih.	V	
15	Jenis dan metode pembelajaran ditetapkan.	V	
16	Perlengkapan pembelajaran ditetapkan.	V	
Melaksanakan proses pembelajaran			
17	Prinsip-prinsip pembelajaran Didiskripsikan.	V	
18	Prinsip-prinsip pembelajaran diterapkan.	V	
19	Evaluasi pembelajaran dilaksanakan.	V	

Sedangkan pengetahuan yang belum diajarkan meliputi: Tujuan pembelajaran dirumuskan. Evaluasi pembelajaran ditetapkan. Instrumen evaluasi pembelajaran disiapkan. Kebutuhan sumber pembelajaran dan fasilitator dirumuskan, Sumber pembelajaran dan kualifikasi fasilitator diidentifikasi, Sumber pembelajaran dan kualifikasi fasilitator ditetapkan, Ragam jenis dan metode pembelajaran didiskripsikan, Ragam perlengkapan pembelajaran diidentifikasi, Jenis dan metode pembelajaran dipilih, Jenis dan metode pembelajaran ditetapkan, Perlengkapan pembelajaran ditetapkan, Prinsip-prinsip pembelajaran Didiskripsikan, Prinsip-prinsip pembelajaran diterapkan, Evaluasi pembelajaran dilaksanakan.

Tabel 12 Perbandingan hasil analisis kompetensi MK yang diajarkan di jurusan PLS dengan Kompetensi SKKNI FPM

NO	Komptensi Kerja FPM	Presentase penerapan di MK Jurusan PLS
1.	Membangun Relasi Sosial	100 % telah dilaksanakan
2.	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat	100% telah dilaksanakan
3.	Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik	100 % telah dilaksanakan
4.	Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan	100 % telah dilaksanakan
5.	Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator	Belum diterapkan (0%)
6.	Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat	Belum diterapkan (0%)
7.	Membangun Jejaring dan Kemitraan	Belum diterapkan (0%)
8.	Membangun Solidaritas Sosial	50 % telah dilaksanakan
9.	Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal	20 % telah dilaksanakan
10.	Memperkuat Posisi/Tawar Masyarakat	Belum diterapkan (0%)
11.	Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat	35 % telah dilaksanakan
12.	Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat	86 % telah dilaksanakan
13.	Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Belum diterapkan (0%)
14.	Mengembangkan Kemandirian Masyarakat	Belum diterapkan (0%)
15.	Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat	Belum diterapkan (0%)
16.	Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial	Belum diterapkan (0%)
17.	Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat	Belum diterapkan (0%)
18.	Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu	Belum diterapkan (0%)

Rumpun mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan di jurusan Pendidikan Pendidikan Luar sekolah, beberapa kompetensi dan sub kompetensi SKKNI FPM memang telah diajarkan, akan tetapi ada beberapa kompetensi seperti Menyiapkan Kader Pemberdayaan

Masyarakat, Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat, Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial, dan Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat . Hal tersebut karena memang sulit dilaksanakan jika mahasiswa belum terbiasa hidup dalam masyarakat dlam waktu yang lama, artinya harus ada program yang memungkinkan mahasiswa sit in di masyarakat agar mampu menerapkan kompetensi ini.

PENUTUP

Dari data dan pembahasan data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan :

Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang diajarkan di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah belum memenuhi semua standar kompetensi SKKNI FPM. Dari 18 kompetensi ada 8 kompetensi yang sudah di ajarkan di jurusan Pendidikan luar sekolah, dari 8 masih 4 yang sudah 100 % diajarkan seluaruh komponen yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Borang PLS. Kurikulum KKNi Tahun 2014. Surabaya: FIPUNESA

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomer 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : kemnaker